

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang)

Ivana Ardya Pratiwi

Mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

(ivanaardya@std.unissula.ac.id)

Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A.

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

(sridewi@unissula.ac.id)

ABSTRAK

Laporan keuangan adalah manifestasi dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas dan media informasi akuntansi untuk dapat menyampaikan hasil kinerja manajemen keuangan kepada pihak lain. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menguji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan data primer. Populasi dari penelitian ini adalah OPD Kota Semarang dengan sampel sebanyak 125 responden pegawai keuangan OPD Kota Semarang dan menggunakan teknik sensus. Teknik analisis menggunakan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis yang meliputi analisis regresi linier berganda dengan *t-test*. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Laporan Keuangan.

ABSTRACT

Financial statements are manifestations of transparency and accountability of an entity and the media of accounting information to be able to convey the results of financial management performance to other parties. This research was conducted

to analyze and test the effect of the implementation of Financial Accounting Standards (SAP), Regional Financial Accounting Systems the Internal Control System, and the Human Resource Compensation on the Quality of Financial Statements. The population of this study was the Semarang City OPD with a sample of 125 respondents of the Semarang City OPD financial employee and used census techniques. The analysis technique uses descriptive statistics and hypothesis testing which includes multiple linear regression analysis with t-test. The result of this test indicate that the regional financial accounting system and internal control system have a positive effect whi;e the application of government accounting standards and human resource competencies do not affect the quality of local government financial reports.

Keywords: *Application of Financial Accounting Standards (SAP), Regional Financial Accounting Systems, Internal Control Systems Human Resource Competencies, and Quality of Financial Statements.*

PENDAHULUAN

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah dari waktu ke waktu sudah mengalami berbagai perubahan regulasi. Perubahan-perubahan ini adalah bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman standar akuntansi pemerintah sebenarnya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah, supaya dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan adalah manifestasi dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas dan media informasi akuntansi untuk dapat menyampaikan hasil kinerja manajemen keuangan kepada pihak lain.

Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya, perlu menerapkan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, terutama di bidang akuntansi pemerintah yang berkelanjutan sehingga terbentuk sistem yang sesuai. Dengan adanya laporan keuangan, baik keuangan pusat dan daerah diharapkan dapat dikelola

dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, ekonomi, efisien, efektif dan akuntabel. Keberadaan laporan keuangan ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai kewajiban tanpa menjadikan keuangan sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayah.

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus ditingkatkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan refleksi untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik yang relevan, andal, sebanding, dan dapat dipahami (PP No. 71 tahun 2010), sehingga pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang berkualitas dan bermanfaat.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia adalah sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang berhasil diunduh dari internet, ternyata dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak data yang

tidak sesuai. Selain itu, masih banyak penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah.

Temuan menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan di mana penerapan SAP yang benar dan pemahaman yang baik tentang akuntansi keuangan daerah oleh manajer keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Prinsip penerapan standar akuntansi dalam tata kelola keuangan daerah yang baik adalah suatu keharusan yang harus diterapkan di semua negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk membuat penerapan standar akuntansi dalam tata kelola keuangan daerah yang baik, perlu memperkuat sistem dan lembaga berdasarkan hukum dan peraturan. Salah satu upaya untuk mewujudkan penerapan standar transparansi dan akuntabilitas untuk manajemen keuangan Pemerintah adalah diundangkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah akan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat Sistem Pengendalian Internal pemerintah itu sendiri. Pada Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada di instansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah daerah membuat program/ kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan ini berfokus pada *principal* dan *agent* serta menjelaskan tentang ada hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak di sini disebut prinsipal (*prinsipal*) yang mempekerjakan pihak lain yang disebut agen (*agen*) untuk melakukan beberapa layanan termasuk pendelegasian wewenang.

Praktek dalam organisasi sektor publik adalah konsep yang didasarkan pada teori agensi. Pejabat pemerintah yang bertindak sebagai agen akan melayani masyarakat sebagai pemilik (*principal*), karena dalam konteks kewarganegaraan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan sistem pemerintahan demokratis Indonesia, “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Pemerintah dan rakyat memiliki tujuan bersama yaitu penerapan tata kelola negara yang baik, sehingga agensi cocok untuk organisasi sektor publik.

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Said (2015) Teori Stewardship merupakan teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yang pada hahikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung

jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Teori kepengurusan (*stewardship*) dapat diterapkan pada organisasi sektor publik seperti pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya. Teori kepengurusan (*stewardship*) memandang manajemen organisasi sebagai *steawards* atau layanan. Pemerintah daerah sebagai pengurus, pengawas menyajikan informasi yang berguna bagi organisasi dan pengguna informasi keuangan pemerintah. Dalam teori ini mengarah pada pendekatan tata kelola yang menghasilkan informasi laporan keuangan berkualitas.

Pengaruh Penerapan Stadar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Definisi standar akuntansi pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No 71 tahun 2010 yaitu; “Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Dengan penetapan SAP, diharapkan akan ada transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Maka kita membutuhkan langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh dan direalisasikan bersama

dalam kerangka Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Irvan Permana, 2011). Didukung dengan penelitian Nurhayati (2015) mengatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, peringkasan dan pelaporan posisi keuangan dan operasional pemerintah. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem yang mencakup proses pencatatan, klasifikasi, menafsirkan, meringkas transaksi atau peristiwa keuangan serta pelaporan keuangan dalam konteks pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Tulus Harefa

(2017) memberikan temuan empiris bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan sistem pengendalian internal yang dilakukan secara komprehensif dalam proses perancangan dan implementasi kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di dalam Kementerian. Sistem kualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik jika bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Sanjaya (2017) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah memiliki efek positif pada nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan oleh ketepatan waktu dan keandalan.

H3 : Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi menurut (Sutrisno, 2017) “mengartikannya sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya”. Suatu organisasi akan berjalan secara efektif dan efisien jika dikelola dengan cara yang benar. Salah satu cara agar berjalan dengan efektif dan efisien terletak pada Kompetensi Sumber Daya Manusia nya. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Tantri (2012) menemukan bukti empiris bahwa secara umum sumber daya manusia di instansi pemerintah.

H4 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang. Sampel yang akan diteliti adalah OPD yang

berada di Kota Semarang, dimana nantinya setiap OPD diwakilkan oleh beberapa responden. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh responden, yaitu kepada dan staff sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang. Dimana peneliti awalnya mengambil sampel sebanyak 125 orang untuk diteliti dalam memberikan pendapatnya.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode sensus. Kuesioner terdiri dari 44 poin pertanyaan, dengan skala yang digunakan untuk mengukur jawaban dari pertanyaan tentang variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini adalah skala likert lima tingkat. Dari pengembalian kuesioner oleh responden, hanya sebanyak 105 yang dapat diolah.

VARIABEL PENELITIAN

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Standar akuntansi pemerintahan diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.	Relevan Andal Dapat Dibandingkan Dapat Dipahami
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.	(SAP): PSAP No 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP No. 02 Laporan Realisasi anggaran PSAP No. 03 Laporan Arus Kas PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan PSAP No 05 Akuntansi Persediaan PSAP No. 06 Akuntansi Investasi PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi

		Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasi PSAP No 12 Laporan Operasional
Sistem Akuntansi keuangan Daerah	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.	Akuntansi penerimaan kas (SAKD1) Akuntansi Pengeluaran Kas (SAKD2) Akuntansi Aset (SAKD3) Akuntansi Selain Kas (SAKD4)
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.	Lingkunga Pengendalian (<i>Control Environment</i>) Penilaian Risiko (<i>Risk Asssment</i>) Aktivitas Pengendalian (<i>Control Activities</i>) Informasi dan Komunikasi (<i>Information and ommunication</i>) Aktivitas Pengawasan (Monitoring Activities)
Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kompetensi Sumber Daya Manusia SDM adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan,	Pengetahua Keterampilan Sikap

	keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya	
--	---	--

UJI KUALITAS DATA

a. Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	r Tabel (N=103)	Keterangan
Penerapan SAP	P1	0,729	0,1918	Valid
	P2	0,811	0,1918	Valid
	P3	0,760	0,1918	Valid
	P4	0,787	0,1918	Valid
	P5	0,734	0,1918	Valid
	P6	0,760	0,1918	Valid
	P7	0,787	0,1918	Valid
	P8	0,798	0,1918	Valid
	P9	0,740	0,1918	Valid
	P10	0,792	0,1918	Valid
	P11	0,675	0,1918	Valid
	P12	0,697	0,1918	Valid
	P13	0,772	0,1918	Valid
	P14	0,747	0,1918	Valid

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2020

Dari Tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa semua butir pernyataan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah valid, karena r hitung $>$ r table nilai sig $<$ 0,10.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	r Tabel (N=103)	Keterangan
----------	--------------------	-----------------------	--------------------	------------

Sistem	P1	0,780	0,1918	Valid
Akuntansi	P2	0,862	0,1918	Valid
Keuangan	P3	0,791	0,1918	Valid
Daerah	P4	0,797	0,1918	Valid
	P5	0,694	0,1918	Valid

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 20

Dari Tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa semua butir pernyataan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah valid, karena r hitung $>$ r table nilai sig $<$ 0,10.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	r Tabel (N=103)	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal	P1	0,798	0,1918	Valid
	P2	0,701	0,1918	Valid
	P3	0,772	0,1918	Valid
	P4	0,749	0,1918	Valid
	P5	0,816	0,1918	Valid
	P6	0,558	0,1918	Valid
	P7	0,642	0,1918	Valid
	P8	0,712	0,1918	Valid
	P9	0,648	0,1918	Valid
	P10	0,670	0,1918	Valid

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2020

Dari Tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa semua butir pernyataan Sistem Pengendalian Internal adalah valid, karena r hitung $>$ r table nilai sig $<$ 0,10

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	r Tabel (N=103)	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	P1	0,748	0,1918	Valid
	P2	0,734	0,1918	Valid
	P3	0,739	0,1918	Valid
	P4	0,760	0,1918	Valid
	P5	0,715	0,1918	Valid
	P6	0,664	0,1918	Valid

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2020

Dari Tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa semua butir pernyataan Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah valid, karena r hitung $>$ r table nilai sig $<$ 0,10

**Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan
 Pemerintah Daerah**

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	r Tabel (N=103)	Keterangan
Kualitas LKPD	P1	0,669	0,1918	Valid
	P2	0,797	0,1918	Valid
	P3	0,784	0,1918	Valid
	P4	0,803	0,1918	Valid
	P5	0,753	0,1918	Valid
	P6	0,780	0,1918	Valid
	P7	0,734	0,1918	Valid
	P8	0,702	0,1918	Valid
	P9	0,706	0,1918	Valid

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2020

Dari Tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa semua butir pernyataan Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah adalah valid, karena r hitung > r table nilai sig < 0,10

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas diperlukan untuk mengukur seberapa jauh kestabilan antara hasil pengamatan yang dilakukan dalam kuesioner pada waktu yang berbeda Berikut ini adalah hasil pengujian yang

menunjukkan nilai alpha pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Pertanyaan	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,9	9	Reliabel
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAP)	0,942	14	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan daerah	0,841	5	Reliabel

Sistem Pengendalian Internal	0,89	10	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,819	6	Reliabel

Sumber; Data Primer Yang Diolah, 2020

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel baik variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia reliabel karena mempunyai nilai *alpha cronbach* > 0,6, sehingga dapat digunakan untuk mengolah data selanjutnya.

UJI ASUMSI KLASIK

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan untuk masing-masing variabel dengan menggunakan *one-sampel Kolmogorov-Smirnov Test* yang dilakukan oleh *software SPSS*. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikan statistik yang dihasilkan dari perhitungan. Jika probabilitas signifikansinya diatas 5% maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 8. Hasil uji Normaitas

Variabel	<i>Sig (2tailed)</i>	<i>p-value</i>	Keterangan
Undstandardized residual	0,055	0,117	Normal

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 8 hasil pengujian normalitas dengan melihat nilai *Kolmogorov-Smirnov* terhadap *Undstandardized residual* adalah 0,055, dapat diketahui bahwa *p-value* untuk data ternyata lebih besar dari $\alpha = 10\%$ ($p > 0,10$), sehingga dapat dinyatakan bahwa keseluruhan data

yang diperoleh memiliki sebaran yang normal.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil uji ini dapat diketahui dari bila *Variance Inflation Factor (VIF)*, jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka nilai *tolerance* > 0,1, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 9 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Hasil
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	0,819	1,22	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,743	1,346	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Sistem Pengendalian Internal	0,797	1,255	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,7	1,428	Tidak Terdapat Multikolinearitas

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1, sehingga tidak terjadi Multikolinieritas.

UJI HIPOTESIS

a. Analisis Linier Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui keakuratan hubungan antara kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (variabel dependen) dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal sebagai variabel yang mempengaruhi (variabel independen) dengan persamaan:

$$Y = 8,431 + 0,80 X_1 + 1,061 X_2 + 0,220 X_3 + 0,257 X_4 + e$$

Keterangan :
 Y : Kualitas Laporan Keuangan

α : Konstanta
 b_1, b_2, b_3 : Koefisien regresi dari variabel independen
 X_1 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
 X_2 : Sistem Pengendalian Internal
 X_3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia
 e : Standart Error

b. Uji F

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$ maka hal tersebut berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	St. Error of The Estimate
1	0,662 ^a	0,438	0,415	3,329

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 2 nilai adjusted R square 0,415. Menunjukkan 41,5% variasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bisa dijelaskan variasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Sedangkan 58,5% dijelaskan oleh variasi lain di luar model.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan terlihat bahwa angka probabilitas pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena dinas pemerintahan Kota Semarang sudah menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam membuat laporan Keuangan dengan baik dan benar. Sehingga penyajian laporan keuangan seperti neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

sudah benar. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Aditya Sanjaya (2017) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan terlihat bahwa angka probabilitas pada variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal sudah dilakukan secara lengkap dan menyeluruh terhadap sistem akuntansi mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Sistem Pengendalian Internal secara lengkap dan menyeluruh sepenuhnya mengurangi pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Tawaqal & Suparno (2017) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan terlihat bahwa angka probabilitas pada variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sub bagian akuntansi atau keuangan organisasi perangkat daerah Kota Semarang memiliki kompetensi sumber daya manusia yang kurang memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Ramdhan (2018) menyatakan bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

KESIMPUNAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif secara sama-sama (simultan) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara parsial atau masing-masing variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel sistem akuntansi keuangan

daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya ruang lingkup hanya dilakukan di Kota Semarang, penelitian ini menggunakan metode sensus dengan tidak memberi pendampingan selama pengisian dan tidak dilengkapi dengan metode wawancara, sehingga jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya, penelitian ini sebagian besar masih mengadopsi kuesioner yang dipakai peneliti sebelumnya, sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan dalam pengukurannya karena belum tentu menggambarkan keadaan yang sama pada objek yang diteliti peneliti sebelumnya. Hasil dari penelitian ini juga masih terdapat variabel-variabel bebas lain yang mempengaruhi dalam penelitian ini.

Dengan adanya keterbatasan diatas, maka disarankan penelitian selanjutnya perlu mengembangkan faktor-faktor lain yang menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, melengkapi metode survei dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab beberapa pernyataan atau pertanyaan yang diajukan sehingga

dapat mengurangi subjektivitas dari responden yang dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden, membuat kuesioner yang baru dan disesuaikan dengan kondisi daerah yang akan diteliti sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang sebenarnya, dan diharapkan lebih memperhatikan operasionalisasi variabel dalam kuesioner. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas atau menambah sampel penelitian seperti dari luar Kota Semarang atau menambahkan variabel-variabel lain seperti peran Audit Internal, pemanfaatan teknologi informasi dan pemanfaatan sistem akuntansi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2005). *Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. PP No. 24 Tahun 2005.
- _____. (2008). *Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Internal*. PP No. 60 Tahun 2008.
- _____. (2010). *Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. PP No. 71 Tahun 2010.
- _____. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruar Pada Pemerintah Daerah*. Permendagri No. 64 Tahun 2013.
- A. Dahri Adi Patra, L. B. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 02 No. 01, 1-9.
- Astika Rahmawati, I. W. (2018). Pengaruh Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi (JEBA)*, Vol: 20 No: 2.
- Dasmaran, V. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, Volume 10, Nomor 2.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita* 3(1) Februari 2018, (64-75).
- Desiana Anugrah Budiawan, B. S. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif terhadap

- Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 276-278.
- Fidyah Yuli Ernawati, S. R. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum di Kabupaten Blora. *Jurnal Ekonomi Manajemen Volume 1 No. 2 Febuari*, 86.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (edisi 9)*. Semarang:: Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
- Harefa, T. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan keuangan.
- Kusufi, A. H. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jln. Raya Lenteng Agung No. 101 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610: Salemba Empat.
- Lia Hanifa, A. B. (Volume 1, 2016). Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 2.
- Liziana Widari, S. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Vol. 5 Edisi 10*, 117.
- M Khoirul Abidin, A. J. (2018). Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang. *E-JRA Vol. 07*, 10.
- Melati Ramadhani, A. N. (Vol.12 No.1, 2018). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Basis. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 40-63.
- Merita Endianto, N. T. (2017). Pengaruh Efektivitas Standar Akuntansi pemerintah, Peran Internal Audit dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . *e-Jurnal*, Vol:8 No: 2.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian intern

- dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (2) 2017*, 874.
- Nabila Zubaidi, D. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan . *International Journal of Social Science and Business. Volume 3, 2*.
- Naidr, R., & Hasyim. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Interving Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual (Studi empiris di PEMDA Kabupaten Barru). *Akuntabel, Volume 14 No 1 2017*, 57.
- Nurhayati. (2017). Pengaruh Penerapann Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh. *Jurnal Si-Men, 2*.
- Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. (2010). PP No. 71 Tahun 2010.
- Purnomo, D. A. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi, 2*.
- Putri, A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Sebagai Variabel Intervening. 2.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekertariat Negara: UU no. 17 Tahun 2003.
- Safitri, D. M. (2019). Pengaruh Penerapan PSAK 45, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik . *E-JRA Vol. 08*, 98.
- Sanjaya, A. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sumber Daya Manusia

- terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi . *JOM Fekom, Vol.4 No.1 (Februari, 2017)*, 366.
- Septo Nugroho, B. E. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Profiet , Volume, 1*.
- Syarifudin, A. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02*, 26.
- Tawaqal, I., & Suparno. (2017). Pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol.2 No.4 (2017)*, 125.
- Verliani Dasmara, T. Y. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pandeglang . *Jurnal Akuntansi Maranatha, Volume 10, 2*.
- Setiawan, D. (2018, Juli Selasa). *Tribun Jateng*. Diambil kembali dari [Tribunjateng.com: https://jateng.tribunnews.com/2018/07/24/jauhari-sebut-ada-9-temuan-bpk-di-lhp-laporan-keuangan-pemkab-semarang](https://jateng.tribunnews.com/2018/07/24/jauhari-sebut-ada-9-temuan-bpk-di-lhp-laporan-keuangan-pemkab-semarang)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, A. (2018). Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, Vol: 6 No: 2.
- Suryaningsih, M. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya

IDENTITAS PENELITI



Nama : Ivana Ardya Pratiwi
NIM : 31401606436
Tempat/Tanggal Lahir: Kab.Semarang, 03 November 1997
Alamat : Jl. Moch Yamin No 94 RT 03/01 Kuncen, Ungaran Barat
No. HP : 081225309511
Email : Ardya38@gmail.com
Instansi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Alamat Instansi : Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang 5011 Jawa Tengah
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Artikel : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**